STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM WORLD CONFERENCE ON CREATIVE ECONOMY (WCCE) 2018–2023

Yoyoh Rohaniah¹, Benny Pertiwanggono¹, Diva Andhina Larasati^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: divaandhina8@gmail.com

Abstract

The growth of the creative economy has had a significant impact on Indonesia's national development since 2015. Recognizing its vast potential, President Joko Widodo and the Indonesian government identified the creative economy as a strategic sector with the capacity to position Indonesia as a global leader in this field by 2030. In pursuit of this vision, Indonesia initiated the first-ever international conference on the creative economy—the World Conference on Creative Economy (WCCE)—in 2018. This conference aimed to strengthen global collaboration and promote creative industries on a multilateral platform. WCCE also served as a channel for Indonesia's economic diplomacy, designed to expand international cooperation, market access, and institutional partnerships for the creative economy sector. Through various diplomatic initiatives embedded in WCCE, the Indonesian government has contributed to strengthening bilateral relations, fostering policy innovation, and enhancing support mechanisms for creative economy actors. This research aims to analyze Indonesia's economic diplomacy practices within the framework of WCCE from 2018 to 2023. Employing a qualitative descriptive method based on document analysis, the study explores the policy instruments and international engagements mobilized to achieve Indonesia's aspiration to become a global creative economy hub.

Keywords: *Economic diplomacy, creative economy, World Conference on Creative Economy, sustainable development, international cooperation*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi kreatif telah memberikan dampak yang luar biasa kepada perekonomian Indonesia sejak tahun 2015. Dengan besarnya potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia, Presiden Joko Widodo beserta keseluruhan pemerintah Indonesia merasa bahwa Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa menjadi pemimpin ekonomi kreatif global pada tahun 2030. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan konferensi internasional ekonomi kreatif pertama yaitu World Conference on Creative Economy (WCCE) pada tahun 2018, dengan harapan bahwa terbentuknya konferensi internasional ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi kreatif baik secara nasional maupun global. WCCE menjadi platform multilateral diplomasi ekonomi Indonesia yang bertujuan memperkuat kerja sama internasional dan memperluas jaringan pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dalam negeri. Tidak luput bagaimana beberapa kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam World Conference on Creative Economy telah meningkatkan ekonomi kreatif nasional, meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain, hingga menciptakan kebijakan-kebijakan dalam negeri yang baru untuk mendukung para pelaku usaha ekonomi kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis beberapa kegiatan diplomasi ekonomi dalam World Conference on Creative Economy yang telah dilakukan pemerintah Indonesia guna mencapai keinginan Indonesia menjadi pemimpin ekonomi kreatif global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis dokumen dengan fokus pada diplomasi multilateral, kapasitas kebijakan, dan kerja sama kelembagaan.

Kata Kunci: Diplomasi ekonomi, ekonomi kreatif, World Conference on Creative Economy, pembangunan berkelanjutan, kerja sama internasional

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015, sektor ekonomi kreatif telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 7,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2017 (Badan Ekonomi Kreatif, 2018). Pertumbuhan ini mencerminkan potensi besar ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Di samping kontribusi ekonomi, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja dan membuka ruang inovasi di berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, desain, aplikasi digital, film, dan kuliner. Potensi inilah yang membuat ekonomi kreatif menjadi fokus strategis dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif, diperlukan lebih dari sekadar kebijakan domestik. Diperlukan pula strategi diplomasi ekonomi yang mampu memosisikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam tata ekonomi global berbasis kreativitas. Dalam konteks inilah *World Conference on Creative Economy* (WCCE) pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 di Bali. Forum ini menjadi sarana Indonesia untuk mempertemukan aktor internasional dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membahas perkembangan, tantangan, dan kerja sama di bidang ekonomi kreatif. Dengan menginisiasi WCCE, Indonesia menunjukkan upaya untuk menegaskan kepemimpinan normatif dan agenda-setting di bidang ekonomi kreatif global.

WCCE bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dan mempromosikan nilai-nilai

inklusivitas, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam sektor ekonomi kreatif (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Forum ini juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas pasar, menarik investasi asing, serta membangun citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai isu global, Indonesia tidak hanya membela kepentingan ekonominya, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam forum-forum multilateral yang selama ini didominasi isu konvensional seperti perdagangan dan keamanan.

Penyelenggaraan WCCE merefleksikan dimensi penting dalam diplomasi ekonomi non-tradisional Indonesia. Melalui forum ini, diplomasi ekonomi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk negosiasi dagang atau perjanjian investasi, tetapi juga melalui inisiatif institusional yang menciptakan arsitektur kerja sama baru. WCCE berfungsi sebagai ruang artikulasi kepentingan nasional Indonesia dalam lanskap global yang semakin kompetitif, di mana kekuatan lunak dan inovasi menjadi sumber daya strategis.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam menjadikan WCCE sebagai instrumen efektif diplomasi ekonomi. Pertama, belum adanya kajian akademik yang komprehensif mengenai bagaimana kegiatan WCCE secara konkret berkontribusi terhadap tujuan diplomasi ekonomi Indonesia. Kedua, belum tersedia kerangka analisis yang mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan melalui forum multilateral seperti WCCE, serta bagaimana strategi tersebut berinteraksi dengan dinamika domestik dan internasional. Ketiga, terdapat kesenjangan antara tujuan jangka

panjang Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi kreatif global dengan keberhasilan taktis jangka pendek yang dicapai melalui pelaksanaan WCCE.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan tidak hanya sebagai ekspresi kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai hasil dari kalkulasi politik domestik dan internasional. Dalam hal ini, penting untuk menelaah bagaimana Indonesia menavigasi kepentingan nasional, tekanan global, serta peluang institusional untuk memaksimalkan posisi dalam ekonomi kreatif global. Upaya Indonesia dalam mengarusutamakan ekonomi kreatif melalui WCCE perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika dua level, yaitu interaksi antara tekanan internasional dan pertimbangan kebijakan domestik.

Kekosongan ini menunjukkan adanya *research gap* dalam pemahaman kita mengenai strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui forum multilateral seperti WCCE. Pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam konteks ini adalah: *Bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dimanifestasikan melalui penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) pada periode 2018 hingga 2023?*

Struktur artikel ini disusun sebagai berikut: bagian kedua menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui WCCE. Bagian ketiga memaparkan metodologi penelitian yang diterapkan. Bagian keempat menyajikan temuan dan pembahasan mengenai pelaksanaan WCCE dan relevansinya terhadap diplomasi ekonomi Indonesia. Bagian kelima menyimpulkan temuan

utama dan memberikan refleksi serta implikasi akademik dan kebijakan.

KERANGKA ANALISIS

Dalam menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui forum *World Conference on Creative Economy* (WCCE) tahun 2018 hingga 2023, digunakan tiga tingkatan teori yang terintegrasi: teori besar (*grand theory*), teori menengah (*middle-range theory*), dan teori terapan (*applied theory*). Kerangka ini memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami dinamika strategi, aktor, dan institusi yang terlibat dalam diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks multilateral.

Teori besar yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Neoliberal Institutionalism*. Teori ini dikembangkan oleh Robert Keohane dan berangkat dari asumsi bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kerja sama tetap dimungkinkan jika terdapat institusi yang mampu mengurangi ketidakpastian dan menyediakan mekanisme kepatuhan (Keohane, 1984). Institusi internasional dalam pandangan ini bukan hanya arena, melainkan aktor yang menyediakan kerangka kerja bersama, mengatur ekspektasi perilaku, serta meminimalisasi biaya transaksi antarnegara. Teori ini memfokuskan pada pentingnya pengulangan interaksi, kejelasan norma, dan informasi yang simetris sebagai elemen pendukung kerja sama.

Dalam konteks penelitian ini, WCCE dipahami sebagai forum multilateral baru yang memfasilitasi pembentukan norma, jaringan kebijakan, dan pertukaran praktik terbaik dalam ekonomi kreatif. WCCE menunjukkan bahwa institusi tidak harus bersifat

formal atau legalistik untuk berperan penting dalam diplomasi. Forum ini menjadi platform informal namun strategis yang memperkuat posisi Indonesia melalui penciptaan institusi baru di luar struktur global tradisional seperti WTO atau IMF. Hal ini sejalan dengan argumen teori bahwa negara-negara berkembang dapat memperluas pengaruhnya melalui pembentukan institusi tematik yang merespons isu-isu baru, seperti ekonomi kreatif. Dengan menginisiasi WCCE, Indonesia bertindak bukan hanya sebagai partisipan, melainkan sebagai arsitek institusi.

Teori menengah yang digunakan adalah *Economic Diplomacy*. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara menggunakan instrumen diplomasi untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, baik melalui promosi ekspor, penguatan branding nasional, negosiasi investasi, maupun keterlibatan dalam pengaturan kebijakan ekonomi internasional (Bayne & Woolcock, 2011). Diplomasi ekonomi dipandang sebagai kombinasi antara instrumen politik dan alat ekonomi untuk memaksimalkan kepentingan strategis negara dalam hubungan internasional.

WCCE memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalankan berbagai fungsi diplomasi ekonomi tersebut. Melalui WCCE, Indonesia mempromosikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, menampilkan diri sebagai pemimpin global di sektor inovatif, dan memperluas pengaruh diplomatik melalui tema yang lebih inklusif dan budaya-sentris. Hal ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi ekonomi tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal atau militer, tetapi juga pada kapasitas naratif dan kelembagaan. Studi serupa mengenai Korea Selatan dan "K-

Culture" menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi berbasis budaya dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dalam membangun pengaruh global tanpa konfrontasi langsung (Nye, 2004).

Diplomasi ekonomi Indonesia melalui WCCE juga menunjukkan pergeseran dari strategi diplomasi konvensional ke pendekatan yang lebih tematik dan normatif. Strategi ini memberikan fleksibilitas dalam membangun koalisi, terutama dengan negara berkembang lain yang juga mengandalkan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan. Dengan demikian, WCCE tidak hanya menjadi forum simbolik, tetapi juga instrumen fungsional untuk pencapaian target ekonomi nasional melalui pendekatan multilayered.

Sebagai teori terapan, digunakan *Two-Level Game Theory* yang diperkenalkan oleh Robert Putnam (1988). Teori ini mengasumsikan bahwa diplomasi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik domestik dan struktur internasional secara bersamaan. Negosiator negara harus mempertimbangkan dua arena sekaligus: level internasional (bargaining dengan negara lain) dan level domestik (dukungan atau resistensi dari aktor dalam negeri).

Dalam kasus Indonesia dan WCCE, perumusan dan implementasi strategi diplomasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan konstelasi politik domestik. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menyelaraskan diplomasi luar negeri dengan aspirasi pelaku industri kreatif lokal, serta memastikan dukungan politik dari aktor eksekutif dan legislatif. Di sisi lain, Indonesia juga harus merespons ekspektasi internasional

terkait tema inklusivitas, keberlanjutan, dan kerja sama lintas sektor dalam forum WCCE. Kegagalan untuk membangun 'win-set' di kedua level dapat menyebabkan kebuntuan atau pengurangan efektivitas diplomasi.

Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan tantangan internal Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonomi yang bersifat outward-looking, namun tetap dibatasi oleh faktor domestik seperti anggaran, kapasitas lembaga, dan dinamika elite politik. Beberapa studi mengenai peran emerging powers seperti Brasil dan India juga menekankan pentingnya arena domestik dalam membentuk strategi multilateral mereka (Milani & Pinheiro, 2013). Dengan demikian, kerangka two-level game membantu kita memahami bahwa keberhasilan diplomasi tidak hanya bergantung pada kemampuan negosiasi di luar negeri, tetapi juga pada pengelolaan konsensus di dalam negeri.

Ketiga teori ini—*Neoliberal Institutionalism*, *Economic Diplomacy*, dan *Two-Level Game Theory*—membentuk kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam menjelaskan strategi Indonesia di WCCE. Teori pertama menjelaskan mengapa institusi seperti WCCE menjadi relevan dan strategis, teori kedua menjelaskan isi, tujuan, dan alat yang digunakan dalam diplomasi ekonomi, sedangkan teori ketiga menjelaskan dinamika pelaksanaan strategi tersebut dalam medan dua tingkat yang saling memengaruhi.

Dengan pendekatan ini, analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan teoritis. Kerangka teori ini juga memperkuat kontribusi akademik studi ini dalam pengembangan kajian diplomasi ekonomi Indonesia, yang selama ini cenderung terbatas pada

pendekatan kebijakan luar negeri atau analisis kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek institusional dan interaksi multilevel. Kerangka ini juga membuka ruang untuk digunakan dalam studi komparatif di masa mendatang terkait peran negara berkembang dalam membentuk institusi global berbasis nilai dan sektor inovatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia pada *World Conference on Creative Economy* dapat meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggambarkan fenomena yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan strategi kebijakan luar negeri dan interaksi lintas level antara aktor domestik dan internasional. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan dinamika yang kompleks dan kontekstual dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam forum multilateral seperti WCCE. Proses penelitian kualitatif memerlukan pengumpulan dan evaluasi fakta-fakta non-numerik yang dapat digunakan untuk menjelaskan informasi rumit tentang suatu keadaan tertentu (Ugwu Jovita Nnenna & Val Hyginus U. Eze, 2023). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik tindakan diplomatik, termasuk nilai, kepentingan, dan strategi yang diartikulasikan melalui kebijakan luar negeri.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif deskriptif. Studi kasus dipilih karena memberikan pendekatan yang terfokus dan mendalam terhadap satu unit analisis utama—yaitu

kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum WCCE tahun 2018–2023. Menurut Yin (2018), studi kasus cocok digunakan ketika pertanyaan penelitian bersifat “how” atau “why” dan ketika peneliti tidak memiliki kendali terhadap peristiwa yang sedang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini sangat sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian utama yang menelusuri bagaimana strategi Indonesia dimanifestasikan melalui forum multilateral.

Strategi penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif. Eksploratif karena fenomena yang dikaji—yaitu diplomasi ekonomi dalam ekonomi kreatif—masih relatif baru dan belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademik Indonesia. Interpretatif karena peneliti harus menafsirkan makna dari tindakan-tindakan diplomatik berdasarkan dokumen, narasi resmi, dan hasil forum internasional. Tujuannya bukan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan konfigurasi aktor, strategi, dan institusi berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan metode yang tepat untuk studi kebijakan, karena memberikan akses pada informasi resmi dan historis yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung. Sumber data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan praktik diplomasi Indonesia dalam WCCE, termasuk dokumen resmi pemerintah, laporan konferensi, pidato pejabat, notulensi pertemuan, siaran pers, artikel media daring, publikasi akademik, serta laporan organisasi internasional seperti UNCTAD dan WIPO. Dokumen yang digunakan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga visual

dan multimedia, seperti transkrip video pidato dan dokumentasi acara yang tersedia secara daring.

Data juga dikumpulkan dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta lembaga-lembaga multilateral yang terlibat langsung dalam pelaksanaan WCCE. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan wawancara primer karena keterbatasan akses, namun informasi pendukung tetap diperoleh dari publikasi publik yang diverifikasi keabsahannya. Pendekatan ini disebut sebagai *document-driven inquiry*, di mana analisis kebijakan dilakukan sepenuhnya melalui sumber dokumenter yang relevan dan dapat diverifikasi.

Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan menggunakan pendekatan koding manual. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang telah ditetapkan berdasarkan kerangka teori: *institusi internasional*, *strategi diplomasi ekonomi*, dan *interaksi domestik–internasional*. Proses analisis dimulai dengan membaca seluruh dokumen dan sumber yang tersedia, kemudian dilakukan pengkodean terhadap elemen-elemen penting yang berkaitan dengan tiap kategori teori. Setelah itu, dilakukan analisis *pattern matching* (Yin, 2018), yaitu mencocokkan pola-pola temuan dengan proposisi teoritis dari ketiga teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam tahap interpretasi, data tidak hanya disajikan sebagai kutipan atau narasi, tetapi juga dibahas dalam kerangka konseptual agar terjadi dialog antara data dan teori. *Neoliberal Institutionalism* digunakan untuk menganalisis bagaimana forum WCCE dibentuk, diorganisasikan, dan difungsikan sebagai institusi kerja sama multilateral. *Economic Diplomacy*

digunakan untuk mengevaluasi pesan, instrumen, dan tujuan yang dibawa Indonesia dalam forum tersebut. *Two-Level Game Theory* digunakan untuk memahami bagaimana strategi tersebut dirancang agar sesuai dengan ekspektasi internasional sekaligus tetap mendapat dukungan dari aktor domestik.

Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan konfirmasi silang. Artinya, setiap data atau klaim yang digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan minimal dua sumber lain untuk menghindari bias dan meningkatkan kredibilitas. Misalnya, ketika menilai tujuan diplomasi Indonesia dalam WCCE, penulis mengacu pada dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan, dan liputan media nasional maupun internasional. Langkah ini memastikan bahwa narasi yang disusun tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada verifikasi dokumen. Selain itu, validitas teori dijaga melalui *theoretical triangulation*, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teori untuk menginterpretasikan temuan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia melalui penyelenggaraan *World Conference on Creative Economy* (WCCE) selama periode 2018 hingga 2023. Berdasarkan data dan dokumen yang dikaji, pembahasan ini dibagi menjadi tiga tema utama yang mengacu pada kerangka *Two-Level Game Theory*, yaitu: (1) agenda dan posisi Indonesia di level internasional, (2) mekanisme negosiasi dan diplomasi dalam forum WCCE, dan (3) keterkaitan strategi diplomasi dengan dinamika domestik Indonesia.

Posisi Strategis Indonesia di Level Internasional

WCCE pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 di Bali sebagai inisiatif Indonesia untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai bagian dari diskursus ekonomi global. Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan prinsip *Inclusively Creative* yang menekankan inklusivitas, pembangunan berkelanjutan, dan kolaborasi lintas negara dan sektor. Prinsip ini dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai pembangunan nasional dan sekaligus menjadi kerangka diplomatik yang dapat diterima secara luas dalam pergaulan internasional.

Sebagai penggagas WCCE, Indonesia menempatkan diri sebagai *norm entrepreneur* yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan domestik, tetapi juga membentuk norma baru dalam tatanan ekonomi global. Peran ini mencerminkan transformasi Indonesia dari aktor pasif menjadi aktor institusional aktif. Hal ini didukung oleh keberhasilan Indonesia dalam mengangkat ekonomi kreatif sebagai agenda internasional melalui forum multilateral yang bersifat terbuka, tematik, dan inklusif.

Penetapan tahun 2021 sebagai *International Year of Creative Economy for Sustainable Development* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pencapaian besar diplomasi Indonesia. Resolusi A/RES/74/198 diusulkan oleh Indonesia dan disahkan dengan dukungan mayoritas negara anggota PBB. Inisiatif ini mengindikasikan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia telah mencapai tahap agenda-setting global melalui institusionalisasi sektor baru yang belum banyak dijangkau oleh negara-negara lain (UNGA, 2019).

Indonesia juga menunjukkan konsistensi dalam memfasilitasi kerja sama internasional yang konkret. Dalam WCCE 2021 yang dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19, Indonesia tetap melibatkan lebih dari 30 negara, serta organisasi internasional seperti UNCTAD, WIPO, dan UNESCO. Forum ini digunakan untuk menyampaikan *Bali Agenda for Creative Economy*, yang menjadi dokumen kerja sama multilateralisme dalam sektor ekonomi kreatif (UNCTAD, 2021). Agenda ini menandai keberhasilan Indonesia dalam mengubah forum tematik menjadi instrumen diplomasi institusional yang diakui secara global.

Dengan kerangka *Neoliberal Institutionalism*, peran Indonesia dalam membangun dan memelihara institusi seperti WCCE menunjukkan bahwa negara berkembang dapat menjadi arsitek institusi global bila memiliki kapasitas diplomatik dan agenda tematik yang kuat. WCCE menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman, merumuskan kebijakan, dan menjalin kolaborasi konkret.

Mekanisme Diplomasi dalam WCCE: Strategi Negosiasi Indonesia

Selain fungsi representatif, diplomasi Indonesia dalam WCCE juga bersifat negosiatif. Strategi ini tercermin dalam inisiatif kebijakan, pembentukan kemitraan, dan proses advokasi multilateral yang dilakukan oleh delegasi Indonesia. Dalam forum ini, Indonesia memfokuskan diplomasi ekonomi tidak hanya pada promosi nilai ekspor atau investasi, tetapi juga pada penciptaan *policy space* untuk sektor kreatif dalam perundingan global.

Sebagai contoh, proposal CDIP/26/5 yang diajukan oleh Indonesia

ke Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual WIPO bertujuan membentuk *Creative Economy Advisory Board* sebagai badan konsultatif global. Meskipun proposal ini belum diadopsi secara resmi, proses penyusunannya menunjukkan tingkat koordinasi dan diplomasi teknis yang cukup tinggi antara kementerian terkait, pakar hukum internasional, dan perwakilan tetap Indonesia di Jenewa (WIPO, 2020).

Indonesia juga mengembangkan taktik aliansi tematik, dengan membangun koalisi bersama negara-negara dari Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang memiliki kesamaan kepentingan. Strategi ini memungkinkan Indonesia memperluas basis dukungan dalam forum multilateral serta memperkuat legitimasi narasi yang dibawa ke panggung internasional.

Dalam forum WCCE 2022 di Bali, Indonesia menyelenggarakan sesi tertutup untuk para menteri ekonomi kreatif dari negara-negara mitra, yang menghasilkan *Ministerial Statement on Global Creative Economy*. Pernyataan ini berfungsi sebagai deklarasi kolektif untuk mengintegrasikan sektor kreatif ke dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital global. Diplomasi Indonesia dalam hal ini menunjukkan kemampuan untuk mengubah narasi menjadi kesepakatan politik yang dapat ditindaklanjuti secara bilateral maupun multilateral.

Menurut *Two-Level Game Theory*, keberhasilan diplomasi di level internasional harus selalu dikaitkan dengan kapasitas perunding di level domestik. Strategi diplomasi Indonesia dalam WCCE dipersiapkan melalui rapat koordinasi lintas lembaga, diskusi publik dengan pelaku ekonomi kreatif, serta konsultasi dengan parlemen dan komunitas akademik. Pendekatan ini memungkinkan adanya dukungan luas

terhadap posisi Indonesia dalam forum internasional dan memperbesar *win-set* diplomasi.

Interaksi Strategi Internasional dengan Kepentingan Domestik

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam WCCE tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas konteks domestik. Sebagai negara demokratis dengan beragam aktor, kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya dirancang oleh Kementerian Luar Negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh kementerian sektoral, pemerintah daerah, komunitas pelaku kreatif, dan opini publik. Hal ini menciptakan dinamika dua arah dalam perumusan strategi luar negeri, di mana input domestik memainkan peran krusial dalam legitimasi kebijakan luar negeri.

Contohnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan *Indeks Kota Kreatif Indonesia* sebagai bagian dari strategi domestik yang paralel dengan diplomasi WCCE. Indeks ini digunakan untuk mengukur kesiapan kota/kabupaten dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Melalui pendekatan ini, diplomasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan institusi lokal dan kebijakan afirmatif bagi UMKM kreatif.

Namun, masih terdapat tantangan besar dalam mensinergikan strategi internasional dengan kebijakan nasional. Meskipun diplomasi Indonesia berhasil memperluas pengaruh internasional, masih terjadi disparitas implementasi di tingkat daerah. Banyak pelaku ekonomi kreatif belum sepenuhnya memahami dampak diplomasi seperti WCCE terhadap keseharian mereka. Kesenjangan komunikasi ini menciptakan risiko resistensi kebijakan, terutama jika hasil diplomasi dianggap

elitis atau tidak berdampak langsung terhadap komunitas.

Dalam kerangka *Two-Level Game Theory*, kondisi ini memperlihatkan bahwa *win-set* Indonesia di arena internasional sangat bergantung pada persepsi dan dukungan domestik. Pemerintah harus memastikan bahwa diplomasi luar negeri disusun berdasarkan kebutuhan nyata aktor lokal, bukan hanya proyeksi simbolik di panggung global.

Selain itu, dinamika politik domestik seperti perubahan kepemimpinan, reformasi kelembagaan, dan fluktuasi anggaran juga memengaruhi kontinuitas strategi diplomasi. Penyelenggaraan WCCE memerlukan dukungan lintas sektor dan lintas pemerintahan agar tidak terjebak menjadi proyek temporer yang kehilangan daya dorong setelah momentum internasional berakhir.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam WCCE adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara tekanan global, kepentingan domestik, dan struktur kelembagaan. *Neoliberal Institutionalism* menjelaskan bagaimana Indonesia memanfaatkan forum multilateral untuk membangun arsitektur kerja sama baru. *Economic Diplomacy* menjelaskan bagaimana strategi Indonesia diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi dan memanfaatkan nilai budaya sebagai sumber daya diplomatik.

Yang paling relevan, *Two-Level Game Theory* memberikan pemahaman konseptual tentang bagaimana Indonesia merancang strategi diplomasi yang bisa diterima di level domestik dan level internasional secara bersamaan. Strategi

ini tidak bersifat linier, tetapi bersifat adaptif, kontekstual, dan multi-aktor.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya sinergi antara perumusan kebijakan luar negeri dan aspirasi domestik. Tanpa dukungan dari bawah, diplomasi luar negeri akan kehilangan daya legitimasi. Sebaliknya, tanpa strategi internasional yang kuat, potensi ekonomi kreatif nasional akan sulit menembus pasar global.

KESIMPULAN

Strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) merupakan wujud konkret dari upaya Indonesia untuk memposisikan diri sebagai pemimpin dalam sektor ekonomi kreatif global. Selama periode 2018 hingga 2023, Indonesia tidak hanya berhasil menyelenggarakan tiga forum WCCE, tetapi juga mendorong ekonomi kreatif sebagai isu global melalui agenda multilateral dan kerja sama strategis dengan berbagai negara dan organisasi internasional.

Keberhasilan utama dari strategi ini adalah penetapan tahun 2021 sebagai Tahun Ekonomi Kreatif Internasional oleh PBB, yang menjadi tonggak pencapaian diplomasi ekonomi tematik Indonesia. Dalam proses ini, Indonesia mampu menavigasi diplomasi dua tingkat (*two-level diplomacy*) dengan mengelola ekspektasi dan kepentingan dari level domestik dan internasional secara simultan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melakukan koordinasi lintas sektor untuk membangun *win-set* yang mendukung posisi Indonesia dalam forum global.

Diplomasi ekonomi dalam WCCE juga menunjukkan dimensi kelembagaan yang kuat. Dengan membentuk forum tematik yang inklusif dan berorientasi pada kerja sama, Indonesia telah berhasil menciptakan institusi baru yang memperkuat norma internasional terkait ekonomi kreatif. Langkah ini tidak hanya sejalan dengan *Neoliberal Institutionalism*, tetapi juga mencerminkan pendekatan diplomasi ekonomi strategis yang adaptif terhadap perubahan struktur global.

Di sisi lain, diplomasi ini juga menghadapi tantangan internal yang signifikan. Koordinasi antar kementerian, kesenjangan pemahaman antara pelaku domestik dan kebijakan luar negeri, serta terbatasnya sumber daya di level lokal menjadi hambatan dalam mengintegrasikan hasil diplomasi internasional dengan kebijakan nasional. Namun demikian, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional dan meningkatnya kerja sama bilateral menunjukkan bahwa strategi ini tetap menghasilkan dampak nyata.

Berdasarkan kerangka *Two-Level Game Theory*, strategi diplomasi Indonesia dalam WCCE mencerminkan model negosiasi simultan yang efektif. Indonesia berhasil memanfaatkan peluang internasional tanpa mengabaikan konteks domestik, serta mampu membangun narasi yang diterima oleh komunitas global dan masyarakat nasional.

Kesimpulannya, diplomasi ekonomi Indonesia melalui WCCE bukan hanya instrumen promosi, tetapi juga platform strategis untuk reposisi global. Forum ini menjadi cerminan dari kapasitas Indonesia dalam membentuk arsitektur global baru di sektor ekonomi kreatif yang berorientasi pada nilai, kolaborasi, dan keberlanjutan. Implikasi dari penelitian ini membuka ruang untuk

studi lanjutan mengenai diplomasi ekonomi tematik dan efektivitas forum multilateral sebagai instrumen kebijakan luar negeri negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayne, N., & Woolcock, S. (2011). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* (3rd ed.). Ashgate Publishing.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427–460. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Milani, C. R. S., & Pinheiro, L. (2013). *The politics of Brazilian foreign policy and its analytical challenges*. *Foreign Policy Analysis*, 9(3), 233–252.

Jurnal

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- UNCTAD. (2021). *Bali Agenda for Creative Economy*. United Nations

Conference on Trade and Development. <https://unctad.org>

Laporan & Dokumen Pemerintah

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Statement at the Second Committee of 74th Session of the United Nations General Assembly for Agenda Item 17: International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021*. <https://kemlu.go.id>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022, September 9). *Indonesia to host the 3rd World Conference on Creative Economy*. <https://kemlu.go.id>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020a). *Statistik pariwisata dan ekonomi kreatif 2020*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020b). *Infografis data statistik indikator makro pariwisata dan ekonomi kreatif*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Schedule of WCCE 2022*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Outlook pariwisata & ekonomi kreatif Indonesia 2023*.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). *CDIP/25 Proposal: Creative Economy Advisory Board*.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2021). *CDIP/26 Day 2 Webcast*. <https://webcast.wipo.int>

Media & Sumber Web Lain

- Artanti, A. A. (2023, October 14). *Penyerapan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif lebih cepat*. MetroTV News. <https://www.metrotvnews.com>
- Sebayang, R. (2018, September 25). *Regulasi jadi tantangan pengembangan ekonomi kreatif*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Sirait, J. (2019, November 11). *Dampak perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata*. Detik. <https://news.detik.com>
- Marsudi, R. (2021, September 24). *Ministerial Side Event on Resilient Creative Economy for a Thriving Future*. UN Web TV. <https://webtv.un.org>
- Ugwu Jovita Nnenna, & Val Hyginus U. Eze. (2023). *Qualitative research*. IDOSR Publications.